

**(LKJIP) TAHUN 2022
BAPPEDA**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laworo , Januari 2023

Kepala Bappeda Kab. Muna Barat,

RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 adalah 86.64%, yang didasarkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh, capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda, dan tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh dengan indikator Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh sebesar 100%,
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda. Indikator Kinerja sasaran ini ada 3 (tiga) yakni Nilai Evaluasi Sakip Bappeda, rata-rata nilai realisasi SKP ASN Bappeda, tindaklanjut hasil temuan LHP BPK dan APIP dengan capaian 100%
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 12 (dua) belas komponen/sub indikator adalah sebesar 100%,

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kab. Muna Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif dan spasial.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kab. Muna Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Isu-isu Strategis	3
1.5. Gambaran Umum OPD.....	3
1.6. Sarana dan Prasarana.....	7
1.7. Keuangan.....	10
1.8. Sistematika LKjIP.....	10
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
2.4 Program dan Kegiatan	16
2.5 Indikator Keberhasilan	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	20
3.2. Realisasi Anggaran.....	26
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Saran	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat
2. Mendorong Bappeda Kab. Muna Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kab. Muna Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kab. Muna Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah- Perubahan Kabupaten Muna Barat 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 81 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017, Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Bappeda Kab. Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kab. Muna Barat senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan. Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya). Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda Kabupaten Muna Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.
4. Penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan masih minim baik dari segi kuantitas data maupun kualitas data.

Permasalahan pokok terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian yaitu:

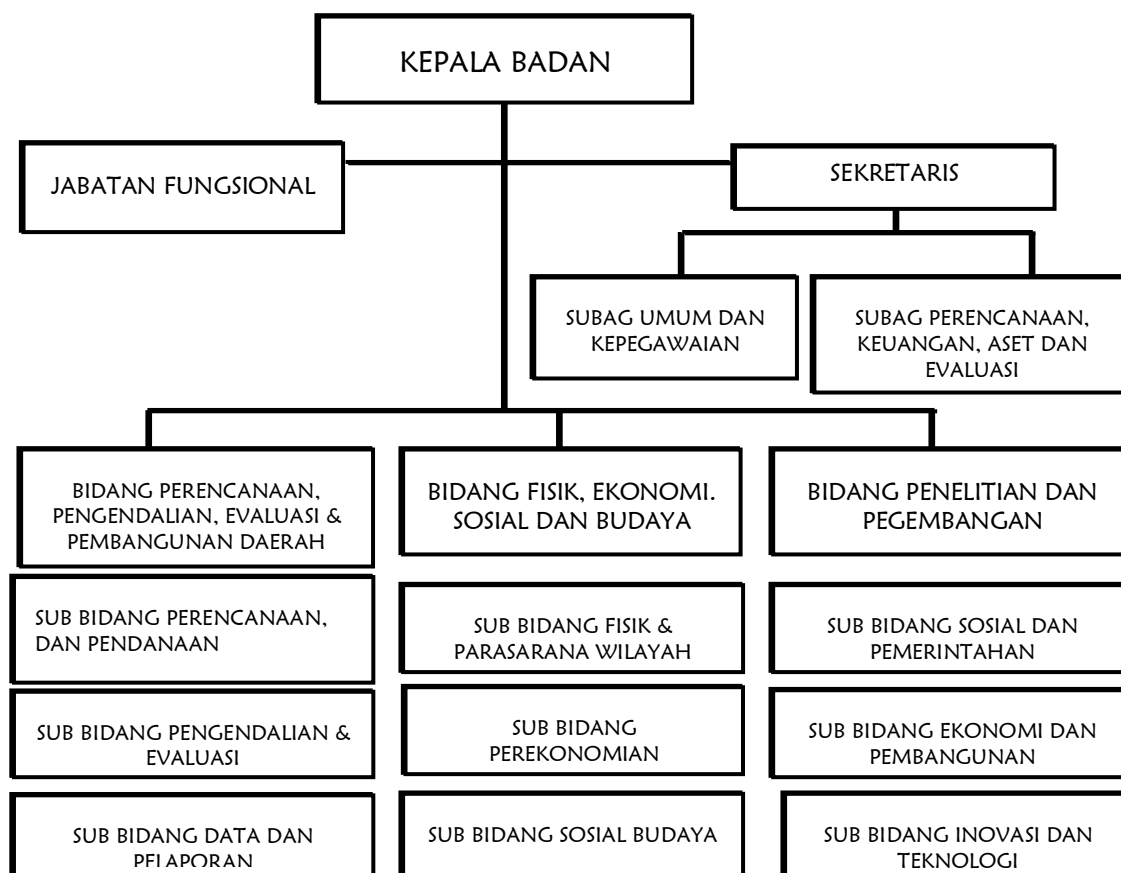
1. Belum tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
2. Minimnya kajian dan penelitian berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah.

1.5 Gambaran Umum OPD

Bappeda Kab. Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Bappeda Kabupaten Muna Barat diklarifikasikan dalam Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, Berdasarkan Peraturan Bupati Muna No. 20 tahun 2017, susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari (i) Sekretariat, (ii) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah, (iii)

Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan (iv) Bidang Penelitian dan Pengembangan; Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari; (a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi, dan (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari: (a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, (b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan (c) Subbidang Data dan Pelaporan. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari (a) Subbidang Fisik dan Prasarana Wilayah, (b) Subbidang Perekonomian, dan (c) Subbidang Sosial Budaya. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: (a) Subbidang Sosial dan Pemerintahan, (b) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan (c) Subbidang Inovasi dan Teknologi. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muna Barat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, Bappeda Kabupaten Muna Barat di dukung oleh 13 Orang ASN. Pemenuhan jumlah ASN Bappeda pada tahun 2022 hanya mencapai 32.5%. Minimnya keterpenuhan ASN juga diikuti dengan minimnya kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka dilakukan perekrutan pegawai honorer sebanyak 16 orang dan diikuti dengan peningkatan kapasitas kompetensi ASN melalui penyelenggaraan Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah. Gambaran kondisi dan kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2022 ditunjukan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Kondisi dan Kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2022

No	Eselon	Kebutuhan ASN	Jumlah ASN Yang ada	Persen Pemenuhan
1	Eselon IIb	1	1	100%
2	Eselon IIIa	1	1	100%
3	Eselon IIIb	3	3	100%
4	Eselon IVa	11	0	0
5	Staf	24	8	33%
	Jumlah	40	13	32.5%

Berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat didominasi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 sebanyak 30,76%, S1 sebanyak 38,45% dan tamatan SMA sederajat sebanyak 15,38%. Tingginya ASN dengan latar belakang pendidikan S2 menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat di tengah minimnya jumlah ASN. Secara ringkas kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2022 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persentase Pendidikan
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	2	0	0	15,38
Diploma III	0	0	0	0	0,00
Diploma IV	1	1	0		
-Politik Pemerintahan	1	1	0	0	7,69
Sarjana Strata 1	5	2	3		
- Jurusan Kehutanan	1	1	0	0	7,69
- Jurusan Teknik	1	0	1	7,69	7,69
- Jurusan Statistika	2	0	2	15,38	15,38
- Jurusan Ilmu ADM. Negara	1	1	0	0	7,69
Sarjana Strata 2	5	4	1		
S2 Bidang Ilmu Lingkungan	2	2	0	0	15,38
S2 Bidang Penginderaan Jauh	2	2	0	0	15,38
S2 Bidang Ilmu Manajemen	2	1	1	15,38	15,38
JUMLAH	13	9	4	38,45	100

Latar belakang pendidikan S1 dan S2 sebagaimana tabel 1.2 di atas, sudah sesuai dengan kebutuhan Bappeda Kabupaten Muna Barat. Guna menghadapi tantangan kedepan, khususnya berkaitan dengan tuntutan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ditengah perkembangan industri 4.0, Bappeda Kabupaten Muna Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan keterampilan para pegawai dalam penguasaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang Perencanaan Pembangunan melalui Pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Jenjang Kepangkatan, komposisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari Golongan IV sebanyak 27,27 %, Golongan III sebanyak 54,54 %, dan golongan II sebanyak 18,18%. Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 menurut Jenjang Kepangkatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
menurut Jenjang Kepangkatan

Pangkat/ Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					
	A	B	C	D	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	0	0	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	1	1	7,69
Golongan III	6	1	1	1	9	69,23
Golongan IV	2	0	1	0	3	23,07
JUMLAH					13	100

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dibantu oleh pegawai sebanyak 13 orang. Adapun tugas pegawai honer adalah menjaga keamanan kantor, menjaga kebersihan kantor, membantu pelaksanaan administrasi keuangan dan membantu penyelesaian administrasi perkantoran lainnya. Kondisi pegawai honorer Bappeda Kabupaten Muna barat Tahun 2022 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4.
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1	1	50	15.38
Sekolah Menengah Umum (SMU)	4	0	0	0	0
Diploma III	2	1	1	50	15.38
Sarjana – Strata 1	8	5	3	37,50	61.53
Sarjana – Strata 2	1	-	1	100	7.69
JUMLAH	13	7	6	50	100

Dari tabel 1.2 dan Tabel 1.4. di atas dapat dilihat bahwa di Bappeda Kabupaten Muna Barat sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai (ASN dan honorer) dari perempuan telah mencapai 30,44%, walaupun dicantumkan (1) khusus Foto ASN Bappeda dan (2) Foto ASN bersama Honorer.

1.6 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Jumlah sarana dan prasarana Bappeda Muna Barat Tahun 2022 menurut nilai asset yang dimiliki terlihat pada tabel berikut.

Tabel. I.5.
Jumlah Aset Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Brandkas	Buah	1	35.000.000	Krisbow KW20-94
2	Kamera	Buah	1	12.000.000	Nikon
3	Dispenser	Buah	1	6.000.000	Royal / RCA2113BK
4	Filling Kabinet	Buah	7	35.500.000	2 Frontline, dan 5 Brother
5	Genset	Buah	1	10.000.000	Amass
6	HDD External	Buah	6	8.400.000	Lion, Frontline, dan Brother
7	Cangkir	Buah	12	420.000	Sango
8	Flas Disk	Buah	4	700.000	
9	Jumbo S/S	Buah	1	2.750.000	isi 5 liter
10	Karpet	Buah	1	3.000.000	
11	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Buah	13	272.540.000	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Max, 1 Buah Yamaha MT 15
12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Buah	4	973.500.000,00	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga
13	AC	Buah	11	65.940.000	1 Buah LG 1/2 PK, 10 Buah Daikin
14	Kipas Angin	Buah	9	13.500.000	5 Buah Miyako / KST-18 RC, dan 4 Buah Merek Midea

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15	Laptop/Komputer PC	Buah	25	509.080.000	2 Buah Komputer Lenovo, 2 Buah Komputer Asusu, 2 Buah Leptop HP, 4 Buah Dell Inspiron 14 5410 2-in-1, 1 Buah Asus ROG Zephyrus, 1 Buah Axio, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 1 Buah Merek Asus Transformer, dan 5 Buah Laptop merek Asus, 3 Buah Vivobook/5430U
16	Kursi Kerja Eselon I, II, dan III	Buah	11	32.000.000	4 Buah furnitura, 4 Buah Merek Frontline, 3 Buah Xieqiang, dan 3 Buah Kursi Merek Indachi
17	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	7	29.925.000,00	
18	Lensa Zoom Kamera	Buah	1	34.350.000	
19	Meja Kerja/Biro/Sidang	Buah	35	151.435.000	8 Olympic, 11 Vook, 2 Informa, 2 Princes dan 12 Buah Meja Kayu
20	Garpu/Sendok	Buah	88	742.000	36 Karawang, 36 Doll, dan 16 Tanpa Merek
21	Peralatan Jaringan Lokal	Unit	1	20.000.000	
22	Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan	Unit	1	147.600.000	HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4
23	Printer	Buah	25	140.515.000	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1 Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobilleall-In-One, dan 5 Epson L4150
24	Proyektor	Buah	5	85.700.000	1 Sony / VPL EX225, 2 LG Minibeam Nano, dan 2 Epson EB-1795F

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
25	Scaner Portabel/Workforce	Unit	10	60.835.000	1 Scansnp S1100, 5 Epson ES-50, 2 Scansnp IX1600, dan 2 Brother DS Mobile DS-940DW
26	Sofa	Unit	1	34.970.000	1 Inova dan 1 Informa
27	Sound System	Buah	2	76.040.000	BMB/CS-550V MK II, BMB
28	Televisi, Antena dan Raciver	Buah	1	15.000.000	Sony, Indovision
29	Tenda Kerucut	Buah	1	15.000.000	
30	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	Buah	5	10.000.000	ICA / IK 1300
31	Betacam Recorder/Player	Buah	1	15.000.000	Sony =1 Buah
32	Wireless	Buah	1	15.000.000	TOA
33	GPS	Buah	3	24.000.000	Garmin 680 = 3 Buah,
34	Drone	Unit	1	54.450.000	DJI
35	Kamera CCTV	Unit	1	34.430.000	TVC
36	Kamera Teleconference	Unit	1	34.870.000	Logitech
37	Kursi Sidang	Buah	14	69.630.000,00	Informa
38	Kursi Tamu (Bangku Kayu Panjang)	Buah	1	2.750.000	
39	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	8.976.000	Solution X601
40	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	6.490.000	Stihl
41	Papan Nama Kantor	Buah	1	11.990.000	
42	Rak Server	Buah	1	11.000.000	Indorak
43	Wastafel	Buah	2	9.900.000	
44	Gelas	Buah	78	990.000	60 Maxim, 6 Fiori, dan 12 Besar
45	Gorden	Buah	14	5.000.000	
46	Kursi Rapat	Buah	100	55.000.000	Futura
47	Mangkok	Buah	12	210.000	12 Ghinka
48	Piring Makan/Ceper	Buah	60	1.320.000	48 Sango, dan 12 Tanpa merek

No	Uraian	Satuan	Vol	Nilai Aset	Keterangan
1	2	3	4	5	6
49	Tempat Prasmanan, Lalapan, Dimsum dan Tempat Sendok	Buah	16	3150000	
50	Tutup Gelas	Buah	12	60.000	
Total				3.275.106.000	

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Kabupaten Muna Barat sejauh ini dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Muna Barat yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran tugas-tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6
Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2021	2022	
1	Bangunan Gedung	1		Lokasi dan Gedung kantor milik SMP
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	2	2 Unit Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, 2 Unit Suzuki New Ertiga, semua dalam kondisi baik
3	Kendaraan Dinas Roda-2	12	1	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC, 1 Buah N-Mex, 1 Buah Yamaha MT 15
4	Sistem Informasi	1		Sitem Informasi
5	Laptop/Komputer PC	21	4	Laptop Tipe HP sebanyak 2 buah, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 2 Buah Merek Asus Transformer 3, dan 3 Buah Laptop merek Asus, dan 1 Buah Tipe Vivobook/5430U, kesemua unit laptop dengan kondisi Baik
7	Printer	23	2	1 Multifungsi / L210, 5 Epson L220, 3 HP, 1

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2021	2022	
				Epson L1300, 3 Epson L310, 3 Epson L385, 4 HP Officejet250 Mobilleall-In-One, dan 5 Epson L4150
8	Jaringan Telekomunikasi			Jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan Simda Perencana dan Jaringan Lokal

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.7 Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada tahun anggaran 2022 mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 7.560.926.542,00.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
- 2) Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, dan Sistematika penulisan LKjIP.
- 3) Bab II berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.
- 4) Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disamping itu, disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

- 5) Bab IV berisi penutup. Bagian ini memuat simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
- 6) Lampiran adalah bagian akhir dari sistematika penulisan yang memuat antara lain Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat,

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Visi pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan wakil Bupati Muna Barat terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat. Pernyataan visi RPJMD Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022 menjadi arah bagi pembangunan sampai tahun 2022. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat sampai dengan Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”**.

Adapun misi dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Muna Barat merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat adalah Misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan Dan Bermartabat”**, sehingga untuk mendukung tercapainya misi tersebut Bappeda Kab. Muna Barat menetapkan tujuan serta sasaran strategis.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1) Tujuan

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat menetapkan tujuan yaitu **“Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah”**.

2) Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”**.

Tabel 2.1 Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2022)
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	45	100
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	0	100

3) Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, perlu menentukan langkah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius		
Misi ke-5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Efektif, Partisipatif, Transparan Dan Bermartabat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
			Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis
			Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan

			Pembangunan dan Pemerintahan
			Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
			Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan esponsive gender.
			Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat, maka target yang akan dicapai adalah:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.		Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100

	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2022:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2022 Perubahan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,452,000,00	163,893,000,00	APBD

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,417,739,828,00	1,772,992,740,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000,00	-	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	369,108,000,00	511,217,000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941,667,462,00	1,229,171,112,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529,308,000,00	500,000,000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,200,000,00	283,200,000,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,788,360,00	97,295,690,00	APBD
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	844,676,250,00	992,198,250,00	APBD
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	165,000,000,00	320,000,000,00	APBD
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244,379,750,00	262,359,750,00	APBD
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	188,198,800,00	278,707,800,00	APBD
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	156,037,050,00	241,706,050,00	APBD
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	155,998,150,00	279,909,150,00	APBD
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	240,000,000,00	APBD
16	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	342,396,000,00	342,396,000,00	APBD
		5,855,949,650,00	7,155,391,102,00	

2.4 Program dan Kegiatan

Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2022 Perubahan

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	163,893,000,00	161,926,628,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	163,893,000,00	161,926,628,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,772,992,740,00	1,230,825,720,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	1,719,292,740,00	1,188,575,720,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dok	53,700,000,00	42,250,000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	-	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 laporan	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 laporan	-	-

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	511,217,000,00	530,811,218,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 orang	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	557,097,000,00	530,811,218,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,229,171,112,00	1,177,268,491,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5,497,140,00	5,490,000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	5,768,000,00	5,750,000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	270,545,200,00	226,140,000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98%	33,005,800,00	33,000,000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket	8,000,000,00	3,600,000,00
	Penyediaan Bahan/Material	1 paket	56,373,572,00	56,365,000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	1,550,000,00	1,550,000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	756,860,000,00	754,919,591,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	500,000,000,00	462,300,000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	500,000,000,00	462,300,000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	283,200,000,00	283,200,000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	13,200,000,00	13,200,000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	264,000,000,00	264,000,000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,295,690,00	88,336,958,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	13 unit	75,295,690,00	66,336,958,00

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	22,000,000,00	22,000,000,00
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	992,198,250,00	864,541,560,00
	Analisis kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100%	75,000,000,00	74,173,060,00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4 dok	57,522,000,00	57,334,600,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 berita acara	70,000,000,00	-
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 berita acara	101,049,600,00	87,929,350,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	11 usulan	219,808,000,00	219,740,550,00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2 dok	32,999,800,00	-
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100%	435,818,850,00	425,364,000,00
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	320,000,000,00	245,203,039,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dok	155,000,000,00	132,549,039,00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	buku	165,000,000,00	112,654,000,00
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	262,359,750,00	259,078,500,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 laporan	99,906,000,00	99,548,300,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 laporan	162,453,750,00	159,530,200,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	278,707,800,00	208,953,756,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dok	278,707,800,00	208,953,756,00

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	21,999,650,00	21,370,750,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 laporan	10,999,750,00	2,424,000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 laporan	75,057,950,00	63,493,006,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	21,999,750,00	21,960,000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	11,000,000,00	2,658,000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	75,000,000,00	53,220,000,00
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	241,706,050,00	166,268,400,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dok	102,680,650,00	93,587,650,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 laporan	21,999,600,00	21,960,600,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 dok	10,999,700,00	2,344,750,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 laporan	72,987,700,00	23,106,400,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 laporan	21,999,650,00	21,713,500,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dok	11,038,750,00	3,555,500,00
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	279,909,150,00	232,427,600,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dok	76,415,650,00	70,368,200,00

	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 laporan	89,499,650,00	73,913,500,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 laporan	10,999,700,00	3,341,100,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dok	69,994,750,00	59,574,850,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	21,999,650,00	21,713,500,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 laporan	10,999,750,00	3,516,450,00
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	240,000,000,00	215,079,300,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100%	210,000,000,00	201,079,300,00
16	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	342,396,000,00	341,791,661,00
	Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	165,000,000,00	164,785,061,00
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dok	177,396,000,00	177,006,600,00

2.5 Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan. Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis pada tahun 2021 :

Tabel 2.7 Target Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100

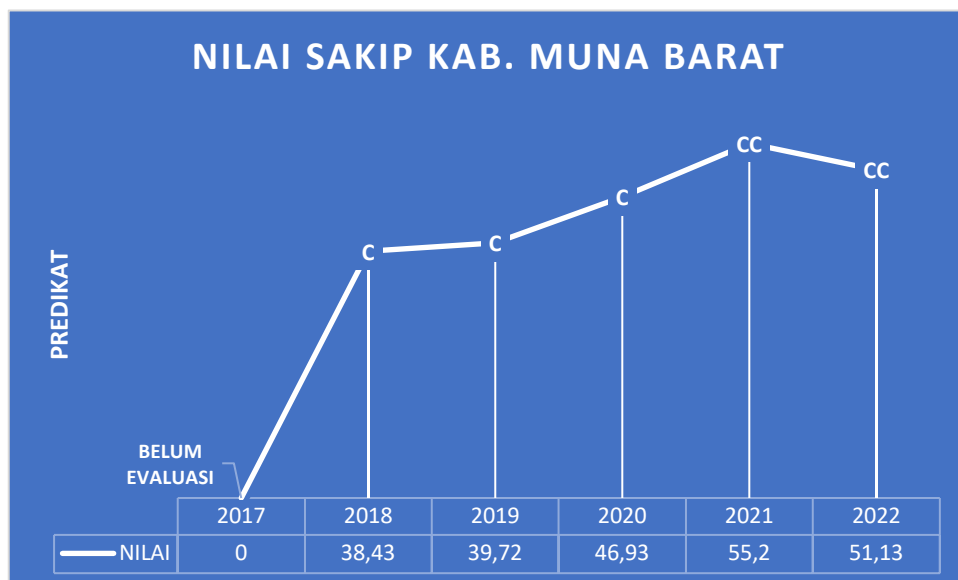
	Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui misi 5 yang terdapat pada RPJMD yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat” dengan sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat berdasarkan sasaran strategis tersebut kemudian mengusung indikator tujuan berupa Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mewujudkan. Berikut adalah nilai SAKIP Kab. Muna Barat berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Devisi Kunwas MENPAN RB:



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN & RB

Gambar 1. Perkembangan Penilaian Hasil Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Tahun 2017-2022)

3.1.1 Capaian Kinerja

Bappeda Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Muna

Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	100	98	98
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	100	90	90
		Nilai SAKIP OPD	Predikat	B 65	B 69.81	107

Bappeda Kabupaten Muna Barat memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat. Pada tahun 2022, **Sasaran Strategis** Meningkatkan kualitas perencanaan dan penelitian pengembangan daerah dengan indikator Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan capaian realisasinya sebesar 98%, Nilai implementasi SAKIP terealisasi sebesar 107%, dan realisasi Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan mencapai 90%.

Secara keseluruhan capaian realisasi target indikator sasaran tersebut rata-rata sebesar 98.33% atau **belum melampaui** dari target yang ditetapkan.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan sangat terkait erat dengan kegiatan musrembang, karena melalui kegiatan tersebut sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang bermuara pada dokumen perencanaan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Persentase konsistensi

dokumen perencanaan Kab. Muna Barat termasuk dalam kategori sangat baik dengan target tahunan sebesar 100% dapat tercapai sebesar 98%.

2. Indikator implementasi SAKIP sangat terkait erat dengan analisis yang sistematis terkait dengan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Nilai SAKIP yang dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 69.81 dengan predikat B dari target sebesar 65, persentase capaian dari indikator ini sebesar 100%.
3. Indikator persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan inovasi daerah. Capaian persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan sebesar 90% dari target 100%.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja berdasarkan indikator dari sasaran strategis 3 tahun terakhir yakni 2020, 2021, dan 2022:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja 2020, 2021, dan 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022
1	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	%	90	95	98
2	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	%	85	85	90
3	Nilai SAKIP OPD	Predikat	B	CC	B

Berdasarkan hasil capaian kinerja mulai pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat bahwa ketiga indikator mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan maupun hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan sudah semakin baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk implementasi nilai SAKIP yang sebelumnya mengalami penurunan, kini sudah kembali mengalami peningkatan. Nilai SAKIP yang sebelumnya mendapat predikat CC, tahun ini meningkat dengan predikat B. Hal ini menandakan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja Bappeda semakin baik. Peningkatan semua indikator ini di dukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muna Barat dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Muna Barat. Pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab bagi

seluruh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muna Barat agar bekerja lebih baik lagi ke depan dan dijadikan motivasi lebih agar target yang ditetapkan dapat terwujud.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Total realisasi s/d tahun 2022	Persentase (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	98	98
		Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	100	90	90
		Nilai SAKIP OPD	B	B	107

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbandingan target di akhir tahun perencanaan dengan pencapaian pada tahun 2022, bahwa dua indikator belum mencapai target yang telah di tetapkan di akhir tahun perencanaan. Meskipun demikian, nilai dua indikator tersebut sudah sangat mendekati target yang ditetapkan. Realisasi kinerja untuk indikator persentase konsistensi dokumen perencanaan mencapai 98% dari target akhir 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 98%. Selanjutnya, persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 90% dari target di akhir tahun perencanaan sebesar 100% dengan persentase ketercapaian sebesar 90%. Sedangkan realisasi untuk Indikator terakhir yakni indikator nilai implementasi SAKIP OPD memperoleh nilai B, atau sebesar 107% dan sudah mencapai target akhir tahun perencanaan yakni B. Oleh karena itu, di tahun akhir perencanaan Bappeda Kab. Muna Barat dapat lebih meningkatkan kinerja untuk ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	98	98	Semakin baiknya sumberdaya Perencana pada setiap OPD dan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur perencanaan semakin dipahami serta berlakunya evaluasi secara berjenjang, mulai dari Kabupaten sampai di tingkat Provinsi	-	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan disesuaikan dengan evaluasi pihak terkait agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan
	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan		Nilai SAKIP OPD	B	B	107	Data-data serta dokumen yang terkait dengan implementasi nilai SAKIP sudah terealisasi sesuai dengan target	-	-
			Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	100	90	90	Penelitian dan Pengembangan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan daerah sehingga rekomendasi hasil litbang besar pemanfaatannya untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	-	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan khususnya untuk perencanaan dan inovasi pada daerah agar terealisasi sesuai target

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	98	98	2,374,881,000	1,976,472,855	83.22	85.5
	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan		Nilai SAKIP OPD	B	B	107	1,574,558,000	1,368,823,099	86.93	
			Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	100	90	90	582,396,000	582,396,000	95.61	

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada persentase konsistensi dokumen perencanaan telah terealisasi sebesar 98% dan pada realisasi anggaran sebesar 83.22%. Untuk realisasi kinerja pada indikator persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan telah terealisasi sebesar 90 % dan realisasi anggaran sebesar 95.61% dari target yang telah ditetapkan. Jika dirata-ratakan untuk capaian kinerja menunjukkan presentase sebesar 98.33%. Sedangkan untuk rata-rata capaian untuk anggaran sebesar 88.59%.

Efisiensi anggaran berada pada taraf sangat efisien yaitu presentase sebesar 85.5% dari pencapaian sasaran strategis semua program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dari target yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana	Ket
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163,893,000	161,941,628	98.81%	DAU	IKU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163,893,000	161,941,628	98.81%	DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-		DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-		DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-		DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-		DAU	IKU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		DAU	IKU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		DAU	IKU

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,772,992,740	1,230,825,720	69.42%	DAU	IKU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,719,292,740	1,188,575,720	69.13%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53,700,000	42,250,000	78.68%	DAU	IKU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-		DAU	IKU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		DAU	IKU
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-		DAU	IKU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		DAU	IKU
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-		DAU	IKU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		DAU	IKU
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		DAU	IKU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	557,097,000	530,811,218	95.28%	DAU	IKU

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-		-	IKU
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	557,097,000	530,811,218	95.28%	DBH	IKU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,229,171,112	1,177,268,491	95.78%	DAU	IKU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,497,140	5,490,000	99.87%	DAU	IKU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,768,000	5,750,000	99.69%	DAU	IKU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270,545,200	226,140,000	83.59%	DAU	IKU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,005,800	33,000,000	99.98%	DAU	IKU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,000,000	3,600,000	45.00%	DAU	IKU
Penyediaan Bahan/Material	56,373,572	56,365,000	99.98%	DAU	IKU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,550,000	1,550,000	100.00%	DAU	IKU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756,860,000	754,919,591	99.74%	DAU	IKU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500,000,000	462,300,000	92.46%	DAU	IKU

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000	462,300,000	92.46%	DAU	IKU
Pengadaan Mebel	24,102,000	23,925,000	99.27%	DAU	IKU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329,310,300	294,580,000	89.45%	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,200,000	283,200,000	100.00%	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	100.00%	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,200,000	13,200,000	100.00%	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,000,000	3,035,000	43.36%	DAU	IKU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,295,690	88,336,958	90.79%	DAU	IKU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75,295,690	66,336,958	88.10%	DAU	IKU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,000,000	22,000,000	100.00%	DAU	IKU
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	992,198,250	864,541,560	87.13%	DAU	IKU
Analisis kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	109,999,580	109,990,000	99.99%	DAU	IKU

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	57,522,000	57,334,600	99.67%	DAU	IKU
Pelaksanaan Konsultasi Publik	70,000,000	-		DAU	IKU
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	101,049,600	87,929,350	87.02%	DAU	IKU
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	219,808,000	219,740,550	99.97%	DAU	IKU
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	32,999,800	-		DAU	IKU
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	435,818,850	425,364,000	97.60%	DAU	IKU
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	320,000,000	231,283,839	72.28%	DAU	IKU
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	155,000,000	118,629,839	76.54%	DAU	IKU
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	165,000,000	112,654,000	68.28%	DAU	IKU

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	262,359,750	261,569,100	99.70%	DAU	IKU
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	99,906,000	102,038,900	102.13%	DAU	IKU
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	162,453,750	159,530,200	98.20%	DAU	IKU
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156,274,550	149,862,120	95.90%	DAU	IKU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	278,707,800	208,953,756	74.97%	DAU	IKU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21,999,650	21,370,750	97.14%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10,999,750	2,424,000	22.04%	DAU	IKU

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75,057,950	63,493,006	84.59%	DAU	IKU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21,999,750	21,960,000	99.82%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11,000,000	2,658,000	24.16%	DAU	IKU
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75,000,000	53,220,000	70.96%	DAU	IKU
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	241,706,050	163,777,800	67.76%	DAU	IKU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102,680,650	91,097,050	88.72%	DAU	IKU

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21,999,600	21,960,600	99.82%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10,999,700	2,344,750	21.32%	DAU	IKU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72,987,700	23,106,400	31.66%	DAU	IKU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21,999,650	21,713,500	98.70%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11,038,750	3,555,500	32.21%	DAU	IKU
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	279,909,150	232,427,600	83.04%	DAU	IKU

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76,415,650	70,368,200	92.09%	DAU	IKU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	89,499,650	73,913,500	82.59%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10,999,700	3,341,100	30.37%	DAU	IKU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69,994,750	59,574,850	85.11%	DAU	IKU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21,999,650	21,713,500	98.70%	DAU	IKU
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10,999,750	3,516,450	31.97%	DBH	IKU

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	240,000,000	53,841,300	22.43%	DBH	IKU
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	210,000,000	39,841,300	18.97%	DBH	IKU
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	342,396,000	337,391,661	98.54%	DAU	IKU
	Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	165,000,000	164,785,061	99.87%	DAU	IKU
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	177,396,000	172,606,600	97.30%	DAU	IKU

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.
2. Terdapat perbedaan nama dan jumlah program pada setiap OPD untuk tahun perencanaan 2023 disebabkan implementasi Permendagri No.90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050/2020.

4.2 Saran

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.